

REDUPNYA PERAN POLITIK ISLAM DI MASA DEMOKRASI TERPIMPIN (STUDI KASUS PEMBUBARAN MASYUMI OLEH PRESIDEN SOEKARNO)

Alim Bathoro

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Haji
albath71@gmail.com

ABSTRACT

In the relationship between Islam and the state it is necessary to clarify the political decision of the ruler over the political role of Islam. As the majority religion in Indonesia, it is only natural that Islam becomes part of the relations in the political decision of the ruler. Therefore, examining the relationship between Islam and the state has an important meaning, for this reason the research seeks to explain the common thread of the state and Islam, especially how the political bargaining of Muslims with the authorities. In the period of Guided Democracy, President Soekarno was a political ruler, along with other political forces such as the Indonesian Army and the PKI. For this reason, tracking President Soekarno's past role in Guided Democracy was a major study in order to reflect the current relationship between the ruler and Islam. This research will look at the role of President Soekarno towards Masyumi in the national political contestation during the Guided Democracy period. The existence of ideological linkages between President Soekarno and President Joko Widodo, makes this research interesting. Are there points of equality between the two as a study of political decision making by a ruler.

Keywords: Islam, politics, rulers, political decisions, political contestation

PENDAHULUAN

Hubungan Islam dengan negara merupakan kajian yang selalu menarik. Karena hubungan tersebut merupakan refleksi hubungan antara agama yang dianut oleh mayoritas penduduk dengan negara. Meski hal tersebut masih dapat diperdebatkan, akan tetapi secara empirik hubungan Islam dan negara akan selalu berpengaruh dalam pengambilan keputusan politik seorang presiden di negeri ini sejak masa kolonial hingga masa reformasi saat ini.

Sebagai contoh kontemporer adalah kurang harmonisnya antara Presiden Joko Widodo dengan Habib Rizieq Shihab, sehingga Habib Rizieq harus meninggalkan tanah air ke Arab Saudi dengan perlindungan Kerajaan Saudi Arabia. Meski tidak ada pernyataan resmi suaka politik dari Kerajaan Saudi Arabia, akan tetapi pemberian hak tinggal di Saudi Arabia karena Habib Rizieq masih keturunan Rasulullah merupakan fakta bahwa suaka politik telah diberikan Kerajaan Saudi Arabia kepada Habib Rizieq.

Maka dari itu mengksplanasi keputusan politik penguasa terhadap peran politik Islam, merupakan kajian utama dalam hubungan Islam dan negara. Kajian tersebut untuk mencari benang merah bagaimana posisi umat Islam dalam proses *bargaining* politik dengan penguasa. Penelitian ini mencoba melacak peran politik Islam di masa Demokrasi Terpimpin. Keterkaitan ideologis antara Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo merupakan titik tekan penelitian ini. Agar dapat merefleksikan pola hubungan Islam dan Negara, meski hal tersebut layak untuk diperdebatkan, akan tetapi secara empirik memiliki persamaan khususnya bagaimana keputusan politik penguasa terhadap peran politik Islam non Nahdatul Ulama (NU).

Harus diakui demokrasi terpimpin adalah antithesis demokrasi liberal, hal ini dapat dirunut dalam beberapa kali pidato Presiden Soekarno Oktober 1956 sebelum Konstituante bersidang pertama kalinya, Soekarno sudah menganjurkan penguburan semua partai politik dan mengecam demokrasi parleraenter yang dianggap kebarat-baratan dan tidak cocok untuk Indonesia. Sedangkan pada waktu pelantikan Konstituante bulan November, Presiden Soekarno sekali lagi menyerang demokrasi liberal dan menghimbau Konstituante supaya tidak menjiplak undang-undang dasar negara lain. Ia menyatakan bahwa untuk sementara Indonesia masih memerlukan demokrasi terpimpin yang tidak didasarkan pada pemikiran liberalisme (Nasution, 1995:419).

Kegagalan Konstituante menurut Adnan Buyung Nasution(1995:418), adalah sikap Angkatan Darat dan Presiden Soekarno yang tetap menjauhkan diri dari Konstituante. Angkatan Darat jelas lebih berjarak dibandingkan dengan Presiden, tetapi kemudian keduanya bekerjasama dalam usaha menentang seluruh hasil pekerjaan Konstituante. (Nasution 1995:418).

Pada Bulan Agustus 1958, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Nasution, dengan dukungan rapat Panglima AD, mengulangi usulnya untuk kembali ke UUD 1945. Usui ini disusul dengan upaya memobilisasi pendapat umum untuk kembali ke UUD 45 serta operasi sapu bersih terhadap partai-partai. Angkatan Darat memobilisasi massa melalui rapat-rapat raksasa dan demonstrasi, menggunakan organisasi paramiliter yang dibentuk untuk merebut kembali Irian Barat, dan mengambil langkah-langkah represif seperti melarang penerbitan surat kabar yang bersikap kritis terhadap pemberlakuan kembali UUD 45, serta menahan para pemimpin partai dengan tuduhan korupsi dengan maksud merendahkan partai-partai politik (Nasution, 1995:429).

Sebenarnya pada awal Demokrasi Terpimpin kita masih percaya bahwa pemerintah beritikad untuk mewujudkan konstitusionalisme, maka sesudah Angkatan Darat mengambilalih pelaksanaan demokrasi terpimpin dengan pemberlakuan kembali UUD 1945, kepercayaan itu memudar (Nasution, 1995:429).

Pada tanggal 5 Juli 1959, kabinet mengadakan rapat di Bogor yang juga dihadiri oleh ketua Mahkamah Agung. Di sanalah tercapai kesepakatan supaya UUD 45 dinyatakan berlaku kembali melalui dekrit, dengan keadaan darurat nasional sebagai pembenaran legal (Nasution, 1995:405).

Zaman demokrasi terpimpin yang dimungkinkan terwujudnya setelah 14 Maret 1957, karena dinyatakan negara dalam keadaan perang atau SOB.

Dimana hukum militer berlaku. di banyak tempat terjadi penahanan-penahanan tokoh-tokoh Islam (Bernard Dahm 1987:406).

Dengan berlakunya Undang-Undang Darurat No 7/1957, maka terbentuklah Dewan Nasional, yang dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Ketua Ruslan Abdulgani. Bagi Soekarno dan pendukungnya, termasuk Angkatan Darat, partai-partai politik itu merupakan penyebab perpecahan nasional karena telah memecah belah masyarakat menurut garis-garis ideologis. Semenjak pembentukan Dewan Nasional, "politbiro" Presiden Soekarno, telah menjadi lembaga pembuat kebijakan eksekutif yang pengaruhnya lebih besar daripada pengaruh Parlemen (Utrecht dalam Nasution 1995:308). Apalagi setelah pidato Jenderal AH Nasution dalam Dies Natalis AMN 1958, yang mana Nasution mengatakan politik "jalan Tengah". Dimana dikatakan AD tidak akan mengadakan kudeta, tetapi juga tidak akan puas membiarkan pemerintahan di tangan politisi sipil dan ingin berpartisipasi dalam pemerintahan (Nasution 1995:298).

Praktis setelah itu, dominasi Presiden serta Angkatan Darat dalam pengambilan keputusan nasional lebih dominan daripada parlemen. Sehingga muncullah dekrit presiden setahun berikutnya, dan berlakulah demokrasi terpimpin. Oleh karena itu, sebagai sebuah sejarah politik peran TNI AD dan Soekarno perlu didalami dan dieksplanasi sehingga penelitian ini dapat memetakan secara tepat bagaimana pengambilan keputusan politik ketika itu. Khususnya terhadap peran politik Islam dalam kehidupan bernegara.

TINJAUAN PUSTAKA

Henry Benda seorang Indonesianis yang pernah menjadi interniran di masa pendudukan Jepang telah melakukan penelitian relasi Pemerintah Pendudukan Jepang dengan Islam. Kesimpulan empirik yang ditarik oleh Benda mengatakan bahwa Pemerintahan Pendudukan Jepang telah gagal

menjadikan Islam sebagai alat kekuasaan penjajah Jepang. Islam terlalu besar untuk dijadikan sekedar alat pembenar keputusan politik penguasa Jepang (Swantoro 2002:188).

Tesis Benda tersebut tampaknya masih relevan hingga sekarang dalam kerangka relasi penguasa dengan Islam. Dalam keterkaitan itu, maka hubungan Presiden Soekarno dengan Masyumi di masa Demokrasi Terpimpin menjadi kajian yang menarik. Karena bagaimanapun juga ada hubungan ideologis antara Presiden Soekarno dengan Presiden Jokowi, khususnya dalam hubungan Presiden Joko Widodo dengan Habib Rizieq.

Soekarno menuduh demokrasi liberal yang diimpor dari Barat, sebagai sumber semua kesulitan yang hams dihadapi negara. Baginya, sistem partai, pemerintahan parlementer, oposisi politik dan perekonomian yang individualistis, semuanya bagian dari sistem liberal yang tidak sesuai dengan jiwa dan tradisi Indonesia. Bayangan Soekarno tentang masyarakat Indonesia ialah kesatuan yang harmonis dan utuh, pertentangan, kontradiksi, dan oposisi akan diganti dengan persesuaian dan mufakat. Soekarno menyerang partai-partai politik dan Parlemen karena dianggap tidak sungguh-sungguh mewakili rakyat karena dikuasai oleh kelompok-kelompok elite yang tidak berpijak pada berjuta-juta rakyat yang seharusnya mereka wakili (Daniel Lev dalam Nasution 1995:305).

Dalam hal yang menyangkut suatu model sistem politik, Soekarno sangat terkesan oleh apa yang ia saksikan di Uni Sovyet dan Cina pada tahun 1956, yang menganut sistem partai tunggal. Ia menggambarkan apa yang disebutnya proses "penyaringan" rakyat untuk membentuk Soviet Tertinggi. Soviet Tertinggi ini kemudian disaring lagi untuk membentuk Presidium, dan kemudian yang terakhir ini disaring sekali lagi untuk membentuk

pemerintahan. Karena itu menurut Soekarno, selalu terdapat garis lurus dari pemerintah ke rakyat (Lev dalam Nasution 1995:306).

1. Definisi Demokrasi Terpimpin

Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1959 dengan judul "Penemuan Kembali Revolusi Kita" menjelaskan butir-butir pokok demokrasi terpimpin dalam dua kategori (1) Tiap-tiap orang diwajibkan untuk berbakti kepada kepentingan umum, masyarakat, dan negara; (2) Tiap-tiap orang mendapat penghidupan layak dalam masyarakat, bangsa dan negara (Soekarno, 1964:372).

Dua kategori ini menjelaskan sasaran yang hendak dicapai oleh sistem itu. Sebelum itu, Soekarno telah menyebutkan definisi tentang demokrasi terpimpin. Satu di antaranya yang terpenting adalah demokrasi terpimpin ialah demokrasi atau dalam UUD 45 dikatakan demokrasi "yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Muhammad Yamin, 1960:212-214).

Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan, tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokrasinya diktatur (soekarno, 1964:376) Artinya demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahannya kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan sesepuh yang tidak mendiktatori tetapi memimpin, mengayomi (Soekarno, 376).

Siapa yang dimaksudkan Soekarno dalam terma-terma "sesepuh" dan "tetua" pada waktu itu tidak lain dari dirinya sendiri sebagai penyambung lidah rakyatnya. Sebagai seorang ayah yang serba bijak dari Keluarga Besar Bangsa Indonesia. Secara terselubung konsep-konsep ini ternyata punya jangkauan politik yang cukup jauh. Sebagai ayah yang serba bijak, maka sudah tentu

tidak akan berbahaya sekiranya kekuasaan di Republik Indonesia sepenuhnya di tangan Soekarno (Ahmad Syafii Maarif (1988:34).

2. Perlawanan Masyumi terhadap Demokrasi Terpimpin

Namun demikian, ternyata Demokrasi Terpimpin telah berdampak pada Masyumi, hubungan Masyumi yang tidak harmonis dengan Soekarno, dan PKI. Baik dalam persidangan Konsituante tentang UUD 45, dan kemudian kecurigaan Soekarno terhadap Islam yang berlebihan. telah membentuk sikap kurang senang Soekarno kepada Masyumi. Apalagi sebagian bekas pengurus pusat Masyumi terlibat dalam PRRI.

Hal terlihat dari pendapat Moh. Natsir (Masyumi) yang mengatakan tidak pernah percaya kepada janji Soekarno. Natsir mangantisipasi.".... bahwa segala-galanya mungkin ada, kecuali kebebasan jiwa..." Dalam istilah biasa yang semacam itu kita namakan satu diktatur sewenang-wenang. Kritik Natsir adalah kritik dari orang yang memilih berada diluar diluar sistem, bahkan menentangnya. Namun demikian, NU lebih memilih berkoalisi dengan Soekarno dengan menerima NASAKOM. Menurut pandangan KH Zaifuddin Zuhri (NU) dan menteri agama dalam masa demokrasi terpimpin mengatakan: "Perjuangan Nu di zaman demokrasi terpimpin tidak istiqomah dan mengabaikan perjuangan politik? Itu tidak benar. Tiap perjuangan di samping factor kekuatan riil juga factor strategi dan waktu. Salahlah jika orang Cuma mengambil kesimpulan mengapa target ini dan itu tidak berhasil? Mengapa orang tidak mengambil kesimpulan yang lain, misalnya: menderita kerugian 25% untuk menghindari kerugian 100% adalah merupakan suatu hasil perjuangan juga. Ada satu kaidah berjoang yang diajarkan pesantren: Maa laa hudraku kulluh laa yutraku ba'duhu, apa yang tidak tercapai 100% janganlah ditinggalkan (dibuang) hasil yang sebagian (yang kurang dari 100%). Dengan kata lain Janganlah bersikap : Jika tidak berhasil 100% lebih baik tidak berhasil

sama sekali. Perjuangan NU di zaman Demokrasi Terpimpin tetap Istiqomah" (Maarif, 1988:35).

Pendapat Natsir dan Zaifuddin Zuhri tidak dapat kita katakan sebagai mewakili pendapat kalangan muslim modernis ataupun kalangan pesantren secara keseluruhan. Tapi secara umum memang demikianlah situasinya. Masyumi yang mewakili sayap muslim modernis telah menentang demokrasi terpimpin sangat gigih ide dan pelaksanaan demokrasi terpimpin, sementara sayap pesantren bersama dua anggota Liga Muslimin lainnya masuk dalam sistem karena berpegang pada kaidah perjuangan pesantren (Maarif, 1988:35).

Dua pola perjuangan yang berlawanan ini telah membawa kedua sayap ummat itu kepada dua kondisi yang berbeda. Sayap modernis akhirnya mengalami kecelakaan sejarah (bubar), sementara sayap pesantren dengan Liga Musliminnya bukan saja dibiarkan hidup, mereka bahkan dimasukkan dalam kerjasama NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis) yang muncul sejak akhir tahun 1960 (Maarif, 1988:35).

3. Pelarangan dan Pembubaran terhadap Masyumi

Namun demikian, ternyata Demokrasi Terpimpin telah berdampak pada Masyumi, hubungan Masyumi yang tidak harmonis dengan Soekarno, dan PKI. Baik dalam persidangan Konsituante tentang UUD 45, dan kemudian kecurigaan Soekarno terhadap Islam yang berlebihan, telah membentuk sikap kurang senang Soekarno kepada Masyumi. Apalagi sebagian bekas pengurus pusat Masyumi terlibat dalam PRRI.

Pada akhirnya, setelah sering bertentangan dengan politik-politik Bung Karno, dan PKI serta setelah beberapa anggota aktif dalam pemberontakan PRRI (seperti bekas Ketua Umum Muhammad Natsir) maka pada bulan Agustus 1960 Soekarno meminta Masyumi (bersama PSI yang dianggap sekutu dekat)

supaya membubarkan diri. Kalau tidak maka akan diancam dibubarkan pemerintah. Pada 13 September 1968 Masyumi menyatakan diri bubar (Nasir Tamara, 1988:41).

Mulai tahun 1960 gerak-gerik tokoh politik Islam dibatasi. Apakah yang terlibat PRRI/Permesta maupun tidak. Bahkan yang menyerah setelah dijanjikan amnesti pun seperti Mohammad Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Boerhanoedin Harahap akhirnya ditangkap. Mereka mendekap di penjara dari 1961 sampai 1967. Tahun 1962 giliran tokoh-tokoh Islam non PRRI dipenjarakan seperti Ketua Umum Masyumi ketika membubarkan diri yaitu Prawoto Mangkusubroto, Mohammad Roem, M Yunan Nasution, E.Z Muttaqin, KH Isa Anshary, juga Hamka, Ghazali Sjahlan, Jusuf Wibisono, Kasman Singodimedjo, Kyai A Mukti, S Soemarsono, Djanamar Adjam, HM Sjaaf, malahan Imron Rosjadi bekas Ketua Pemuda Ansyor juga dipenjara mereka di sana diperlakukan dengan kejam. Pemenjaraan dan penyiksaan-penyiksaan itu mempunyai dampak yang besar. Karena di satu pihak penahanan itu menumbuhkan banyak kesadaran pada kalangan masyarakat bahwa pemerintah Soekarno dalam zaman Demokrasi Terpimpin merupakan pemerintahan yang zalim (Noer dalam Tamara, 1988:42).

Adapun Masyumi tetap bubar, hal itu tidak lain karena Indonesia pada waktu itu telah menjelma menjadi sebuah *maachstaat* (negara kekuasaan) bukan lagi sebuah *rechstaat* (negara hukum), seperti yang diminta oleh UUD 45 (Maarif, 1988:35).

Setelah Masyumi dibubarkan hanya tinggal satu partai besar Islam yaitu NU dan dua partai ukuran sedang yaitu PSII dan Perti. Ketiganya bekerjasama dengan Soekarno semasa demokrasi terpimpin dalam satu ideologi NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Ketiga partai Islam itu hams menghadapi PKI yang makin lama makin agresif memusuhi Islam serta PNI (Ali

Sastroamijoyo) yang dekat PKI. Kepentingan umat Islam tentu tidak tersalurkan sepenuhnya pada ketiga partai politik Islam tersebut. Banyak kritik terhadap mereka. Namun, solidaritas partai-partai Islam itu (terutama NU dan PSII) ditunjukkan dalam membela HMI ketika organisasi ini diganyang terus hendak dihancurkan oleh PKI dan para sekutunya (Bernard Damn 1987:406).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis.

PEMBAHASAN

Meskipun, tuduhan bahwa Masyumi sebagai partai terlibat dalam pemberontakan, tidak disokong oleh satu dokumen otentik. Tetapi bagi Sukarno soal ini sebenarnya tidak begitu penting, sebab yang penting bagi Pemimpin Besar Revolusi ini ialah bahwa "si kepala batu" Masyumi harus dienyahkan guna melicinkan jalan bagi realisasi sistem politik Demokrasi terpimpin-nya. Inilah sebenarnya "logika revolusi" di belakang keputusan Presiden No 200/600 itu. Dan ini pulalah yang sangat diprihatinkan oleh para pecinta demokrasi bahwa Soekarno telah menggiring Indonesia menjadi negara kekuasaan (Maarif, 2006:194).

Setelah Masyumi dibubarkan hanya tinggal satu partai besar Islam yaitu NU dan dua partai ukuran sedang yaitu PSII dan Perti. Ketiganya bekerjasama dengan Soekarno semasa demokrasi terpimpin dalam satu ideologi NASAKOM (Nasionalis, Agama, dan Komunis). Ketiga partai Islam itu harus menghadapi PKI yang makin lama makin agresif memusuhi Islam serta PNI (Ali Sastroamijoyo) yang dekat PKI. Kepentingan umat Islam tentu tidak tersalurkan sepenuhnya pada ketiga partai politik Islam tersebut. Banyak kritik terhadap mereka (Bernard Dahm 1987:406).

Sehingga, praktis partai-partai Islam dalam masa Demokrasi Terpimpin tidak memiliki daya tawar yang tinggi terhadap Presiden. Karena setelah itu kekuatan politik yang dominan adalah Soekarno, PKI dan Angkatan Darat. Ketika kekuatan politik inilah yang saling bersaing untuk mendominasi dalam pembuatan kebijakan nasional. Setelah kekuatan Islam dimandulkan, maka Soekarno dan Angkatan Darat bekerjasama dalam membentuk tatanan baru yang lebih cocok dengan kebutuhan dan mengakui konstelasi kekuasaan yang ada. Orang bisa mengemukakan argument bahwa demokrasi terpimpin merupakan suatu sistem politik yang sehat selama Soekarno dan Nasution tetap saling mengakui fungsi masing-masing dan saling menghormati prerogative masing-masing (Sundhausen, 1982:461).

Setelah Masyumi bubar akhir tahun 1960, perpolitikan Islam diwarnai sepenuhnya oleh Liga Muslimin dengan NU sebagai pemain utamanya. Menghadapi peristiwa-peristiwa sejarah sesudah tahun 1960, seperti pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS (Mei 1963), Indonesia keluar dari PBB (1965), pihak Islam tampaknya tinggal mencarikan dalil-dalil agama untuk membenarkannya. Dan, dalil itu selalu ada (Maarif, 1988:36).

Dan kemudian pembuatan kebijakan nasional didominasi oleh Soekarno, PKI dan Angkatan Darat. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah DWIKORA (Dwi Komando Rakyat) atau yang lebih dikenal dengan Ganyang Malaysia. Soekarno dan PKI saling bekerjasama untuk menyukseskan kebijakan tersebut. Sementara Angkatan Darat menurut Sundhaussen bersikap menudua terhadap DWIKORA (Sundhaussen (1986:296-303).

Keputusan Soekarno untuk menentang Malaysia pertama-tama harus dipahami dalam kerangka ideologisnya. Sikapnya yang anti kolonialis dan anti imperialis menjadi semakin eksplisit. Retorika Soekarno sangat mirip dengan

argumen yang dikemukakan PKI, dan makin lama orang makin sulit untuk membedakan antara ungkapan ideologis Presiden dan ungkapan ideologis kaum komunis, karena kepentingan politik mereka tampaknya kian identik. Pemecatan terhadap Jenderal Nasution, pencabutan Undang-Undang Darurat, menjebloskan lawan-lawan politik ke dalam penjara, telah menjadikan Soekarno telah berhasil menegakkan supremasi politiknya yang mutlak (Sundhaussen 1986: 295-296).

Dominasi tersebut terlihat ketika Soekarno memaksa diterimanya Angkatan Kelima dalam sistem pertahanan RI. PKI mendukung Angkatan Kelima, karena PKI berhasrat memperkuat kekuatan politik mereka dengan Angkatan Kelima, yakni Buruh Tani yang dipersenjatai. Namun, pembentukan Angkatan Kelima ditolak oleh Angkatan Darat, sehingga terjadi ketegangan antara Presiden Soekarno dan PKI disatu pihak dengan Angkatan Darat di pihak lain. Pertentangan ini demikian keras, sehingga muncul intrik-intrik politik antara kedua belah pihak. Misalnya peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara, ketika aksi anggota PKI menyerobot tanah telah mengakibatkan seorang anggota Angkatan Darat tewas.

Bagi kaum modernis, situasi baru ini cukup jelas. Menurut kategori Sukarno, kelompok modernis ini merintanggi penyelenggara revolusi kita, atau dengan memakai jargon komunis, mereka adalah golongan kepala batu, suatu jargon yang juga populer dalam kamus politik Sukarno. Sebagai kekuatan perintang, logika revolusioner Sukarno menyatakan lebih jauh, bahwa golongan modernis, terutama Masyumi, tidak layak hidup pada era demokrasi terpimpin. Logikanya, komentar Mohamaad Roem, "ialah, bahwa harus ditarik garis yang tegas antara sahabat dan musuh revolusi. Masyumi dan pemimpin-pemimpinnya dimasukkan dalam kategori musuh revolusi dan karena itu mereka harus disingkirkan (Maarif, 2006:187).

Yang jelas, ketika 1962, Soekarno berusaha mengakhiri koalisi dengan Angkatan Darat dan bersama-sama dengan PKI mencoba mencampuri peran serta fungsi Angkatan Darat, maka sistem politik kembali ke praktek-praktek politik tanpa struktur seperti tahun 1940-an. Bagian akhir periode demokrasi terpimpin, sudah memperlihatkan tanda-tanda keambrokan sistem. Makin merosotnya kemauan dan kemampuan pemerintah untuk memerintah, mencapai puncaknya dalam peristiwa 1 Oktober 1965, pembunuhan besar-besaran di penghujung 1965, dan pada akhirnya penggulingan Soekarno (Sundhausen, 1982:461).

Kebencian demikian besarnya terhadap Soekarno dan pendukung utamanya yaitu PKI dan PNI kiri. Boleh jadi alasan itu menjadi motor utama dalam aktifnya golongan Islam mendukung Orde Baru menganyang Orde Lama. Tetapi di lain pihak Soekarno pun punya alasan untuk tidak menyukai pemimpin-pemimpin Islam—selain karena mereka menentang politiknya—karena adanya usaha-usaha pemberontakan termasuk percobaan pembunuhan terhadap dirinya yang seringkali dikatakan berasal dari "golongan Islam" (Noer dalam Tamara, 1988:42).

KESIMPULAN

Peran Islam dalam politik jelas sebuah keniscayaan, karena dengan mayoritas penduduk Islam maka kehadiran Islam dalam perpolitikan. Akan tetapi, perpecahan haluan politik kadang menjadikan posisi Islam menjadi terpinggirkan. Apabila dilacak secara mendalam sejarah perpecahan aktivis politik Islam dapat terlihat dari keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952. Menurut Maarif (2006:118) perpisahan politik akar perpecahannya pada struktur kepemimpinan. Kongres November telah menciptakan dua badan dalam Masyumi. Yaitu :1. Dewan Eksekutif, 2. Dewan Partai. Yang pertama bertugas menangani masalah-masalah politik, sedangkan yang kedua

menangani masalah-masalah agama dalam arti sempit, yaitu pertalian dengan isu-isu hukum agama. Kemudian sejak tahun 1949, dewan partai hanyalah berfungsi sebagai dewan penasihat. Ulama-ulama NU sejak dari permulaan memang dinobatkan sebagai raja dalam dewan partai ini. Yang pada kenyataannya terpisah jauh dari politik praktis, dan inilah akar kecemburuan itu. Di sisi lain, Dewan Eksekutif hampir seluruhnya dipimpin oleh pemimpin-pemimpin modernis, atau orang-orang sekolahan. Membatasi peranan para kiai pada Dewan Partai saja tampaknya seakan-akan menempatkan mereka pada posisi inferior. KH Saifuddin Zuhri melukiskan situasi yang dirasa agak pahit dengan kalimat: "Soalnya sederhana saja, Nahdatul Ulama merasa diperlakukan tidak adil oleh dominasi golongan dan perorangan yang kuat kedudukannya lantaran struktur organisasi yang berlaku (Maarif 2006: 122).

Dengan menyimak kenyataan di atas, boleh dipertanyakan bagaimana kira-kira reaksi sayap modernis terhadap sikap akomodatif yang diambil oleh sayap pesantren, yang dalam sidang-sidang Majelis Konstituante mereka sama-sama mempertahankan Islam sebagai dasar negara. Sebuah artikel dalam majalah Hikmah (milik Masyumi) mencerminkan sikap kekecawaan mereka terhadap sayap pesantren (Maarif, 2006:189).

Yang jelas, tampaknya partai-partai Islam setelah kerjasama dalam konstituante untuk memperjuangkan Islam sebagai dasar negara, berubah jadi saling meninggalkan setelah berlakunya demokrasi terpimpin, mereka saling bertarung antar kelompok Islam dalam mempengaruhi kekuasaan.

Ketika demokrasi parlementer, dominasi kelompok Modernis dalam Masyumi termasuk dalam pemerintahan menjadikan NU keluar dari Masyumi pada tahun 1955. Perpecahan tersebut menurut Maarif (2006:122) dipicu diangkatnya KH Fakhri Usman (Muhammadiyah) sebagai Menteri Agama dalam Kabinet Wilopo. Bagi NU jabatan Menteri Agama RI adalah hiburan karena

mereka merasa tersisihkan dalam *power interplay* dengan kelompok modernis di Masyumi. Pengangkatan tersebut merupakan hasil pemugutan suara dalam sidang Masyumi, meski KH Wahab Chasbullah menyatakan keberatan dengan keputusan tersebut

Oleh karena itu menurut Maarif, Muhammad Roem (tokoh Muhamadiyah) tiga puluh tahun kemudian menyesali keputusan pengangkatan KH Usman Fakhri, karena ketika itu pertimbangan demokrasi semata, sehingga Muhammad Roem mengatakan bahwa kriteria demokrasi tidaklah cukup memecahkan masalah politik umat Islam, faktor lain seperti semangat golongan juga menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan (Maarif 2006:121).

Sedangkan KH A Sjaichu (NU) mengomentari perpecahan di kalangan umat, menurutnya karena ada dua faktor: 1. Ummat masih belum memiliki kepemimpinan yang dapat diandalkan. Inilah salah satu sebab mengapa persatuan masih sering goyah; 2) Sebagai konsekuensi logis dari faktor pertama, maka pemimpin-pemimpin umat sering benar membuat keputusan-keputusan politik tanpa mempertimbangkan secara mendalam dampak masa depannya bagi umat secara keseluruhan. Dan, pertimbangan-pertimbangan politik jangka pendeklah yang banyak menentukan corak tingkah laku politik pemimpin umat (Maarif, 2006:120).

Dengan demikian, faktor semangat golongan dan lemahnya kepemimpinan, tampaknya lahir dari warisan pertikaian antara kelompok modernis dan tradisional berkaitan dengan khilafiyah dan furu (perbedaan pendapat masalah hukum fikih) yang merupakan dasar perbedaan kedua kelompok dari dulu hingga sekarang. Perbedaan-perbedaan tersebut belumlah dapat dijumpai dan selalu menjadi isu yang menarik di lapisan masyarakat bawah. Meskipun di tingkat elite hal tersebut saling memahami, akan tetapi di

tingkat akar rumput kedua kelompok seakan terpisah secara budaya. Misalnya, masalah tahlilan, maulud dsb.

Oleh karena itu, perbedaan kedua kelompok tersebut bisa jadi semacam budaya, yang kemudian menjadi perilaku dalam mengidentifikasi masing-masing kelompok. Yang selanjutnya tercermin dalam perilaku para individu termasuk dalam perilaku berpolitik. Dengan demikian perlu riset lanjutan yang mendalam untuk menelaah budaya politik kedua kelompok. Karena bagaimanapun kelompok modernis dan tradisional adalah wujud politik Islam di Indonesia.

Penelitian Henry Benda tentang kehidupan umat Islam di masa Penjajahan Jepang yang kemudian menjadi disertasi doktoralnya dengan judul : Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945. Mencoba menelaah secara mendalam hubungan Islam dengan penguasa Pendudukan Jepang. Dalam kajian tersebut Henry Benda menarik kesimpulan bahwa Pemerintahan Pendudukan Jepang telah gagal menjadikan Islam sebagai alat kekuasaan penjajah Jepang. Islam terlalu besar untuk dijadikan sekedar alat pembenar keputusan politik penguasa Jepang.

Secara lebih lugas seorang Indonesianis Wertheim mengatakan dalam pengantar buku tersebut: "Apapun yang ditempuh oleh kekuatan non muslim dalam politik mereka mengenai Islam, hasilnya selalu akan berbeda dengan apa yang hendak semula dicapai. Itulah yang terjadi dengan Jepang atau Matahari terbit. Jadi Matahari Terbit telah berusaha sekuat tenaga menarik Islam atau Bulan Sabit ke dalam orbitnya. Gagal "Bulan Sabit" agaknya terlalu besar untuk dijadikan sekedar satelit" (Swantoro 2002:188).

Hal senada diungkapkan Mitsuo Nakamura dalam disertasi tentang Muhamadiyah dapat menjadi gambaran bahwa Islam adalah entitas yang mandiri dan selalu berproses. Islam di Jawa sama sekali bukanlah agama yang

sedang layu, tetapi suatu kepercayaan yang hidup penuh tenaga; bahwa Islamisasi di Jawa bukanlah kejadian sejarah yang telah rampung di masa lalu tetapi masih merupakan proses yang telah berlangsung dan berketerusan pada waktu sekarang, bahwa apa yang disebut gerakan reformis Islam (MuhAmmadiyah) adalah perwujudan modern dari pengislaman yang berkelanjutan (Nakamura, 1980:vi).

Yang pasti, dari tesis-tesis disertasi Benda dan Nakamura dapatlah ditarik benang merah bahwa sekuat-kuatnya penguasa tidaklah mampu menjadikan Islam sebagai subordinat kekuasaannya. Dengan demikian, bisa jadi *power interplay* antara kelompok Islam dapatlah dimaknai dari upaya partai-partai Islam mempengaruhi kekuasaan agar Ummat Islam tidak terugikan.

Dalam keterkaitan kontemporer, maka peran Presiden Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin mirip dengan peran Presiden Joko Widodo dalam relasi hubungan Islam dan Negara. Manakala Joko Widodo memilih KH Ma'ruf Amin menjadi Calon Wapres dalam Pemilihan Presiden RI tahun 2019, telah menunjukkan Presiden Joko Widodo memilih NU sebagai mitra politik strategis. Dan di saat bersamaan memposisikan kelompok Islam non NU seperti PKS, PAN, Habib Rizieq dan Persaudaran Alumni 212 sebagai lawan politik. Tekanan politik penguasa terhadap gerakan #2019gantipresiden yang digagas oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan pilihan politik Presiden Jokowi terhadap aktivis Islam non NU. Yang pasti, pada saatnya nanti penelitian ini akan mampu menjelaskan dinamika hubungan Islam dan Negara, dimana akan selalu ada kelompok Islam yang selalu mendampingi penguasa dan atau berseberangan dengan penguasa. Karena pada dasarnya, Islam terlalu kecil ketika hanya dijadikan alat oleh penguasa.

DAFTAR PUSTAKA

Dahm, Bernard, 1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: LP3ES

Maarif, Ahmad Syafii, 2006, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*, Jakarta:LP3ES

-----,*Islam di Masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin*,
Jurnal

Prisma No 5, Tahun XVII, 1988, hal 24-36

Nasution, Adnan Buyung, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia Studi Sosio- Legal Atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Grafiti

Soekarno, 1964, *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid 2*, Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi

Sundhaussen, Ulf, 1986, *Politik Militer Indonesia 1945-1967 Menuju Dwifungsi ABRI*, Jakarta:LP3ES

Swantoro, Polikarpus, 2002, *Dari Buku ke Buku Sambung Menyambung Menjadi Satu*, Jakarta: KPG-Tembi

Tamara, Nasir, *Sejarah Politik Islam Orde Baru*, Jurnal Prisma No 5, Tahun XVII, 1988, hal 37-82